PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PkM-CSR 2017

Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PENDIDIKAN

ISBN: 978-602-50607-2-4

Editor: Rudy Pramono
Adolf J. N. Parhusip

Kulit Muka: Sigit Pamungkas

Penerbit:
Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pelita Harapan
Lippo Village Karawaci, Tangerang -15811
(t) +62-21.5460901 ; (f) +62-21.5460910
e-mail: lppm@uph.edu
Web: www.uph.edu

Cetakan I, Oktober 2017

Hak cipta dilindungi Undang-Undang Hak Cipta
Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh bagian isi buku ini tanpa izin tertulis dari penerbit
@ Oktober 2017

PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PkM-CSR 2017

Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PENDIDIKAN

Reviewer:

Dr. Adolf J.N. Parhusip (Universitas Pelita Harapan)

Dr. Hananto (Universitas Pelita Harapan)

Kholis Audah, Ph.D (Universitas Swiss German)

Dr. Nila K. Hidayat (Universitas Swiss German)

Friska Natalia, Ph.D. (Universitas Multimedia Nusantara)

Rangga, Ph.D. (Universitas Multimedia Nusantara)

Irwan Trinugroho, S.E., M.Sc., Ph.D. (Universitas Sebelas Maret)
Margono, S.Kom. (Universitas Sebelas Maret)

PROSIDING

KONFERENSI NASIONAL
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT DAN
CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY
PkM-CSR 2017

Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha
dalam Meningkatkan Pemberdayaan Masyarakat

TEKNOLOGI TEPAT GUNA DAN PENDIDIKAN

Surakarta, Solo – Jawa Tengah

19 – 21 Oktober 2017

Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat
Universitas Pelita Harapan

KATA PENGANTAR

Pendekatan yang kini sering digunakan dalam meningkatkan kualitas kehidupan dan mengangkat harkat martabat masyarakat yang miskin dan membutuhkan adalah pemberdayaan masyarakat. Konsep ini menjadi sangat penting terutama karena memberikan perspektif positif terhadap orang miskin. Orang miskin tidak dipandang sebagai orang yang serba kekurangan dan objek pasif penerima pelayanan belaka, melainkan sebagai orang yang memiliki beragam kemampuan yang dapat dimobilisasi untuk perbaikan hidupnya. Konsep pemberdayaan memberi kerangka acuan mengenai matra kekuasaan (*power*) dan kemampuan yang terkait dengan aspek manusia, sosial, ekonomi, budaya, politik, dan kelembagaan. Melalui pemberdayaan masyarakat dapat terwujud penyediaan sumber daya, kesempatan, pengetahuan, dan keterampilan bagi masyarakat untuk meningkatkan kapasitas masyarakat sehingga masyarakat bisa menemukan masa depan yang lebih baik. Amanah inilah yang diemban dalam salah satu tri darma perguruan tinggi.

Tri Dharma Perguruan Tinggi, yaitu: Dharma pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Dalam dharma pendidikan, perguruan tinggi diharapkan melakukan peran pencerdasan masyarakat dan transmisi budaya. Dalam dharma penelitian, perguruan tinggi diharapkan melakukan temuan-temuan baru ilmu pengetahuan dan inovasi kebudayaan untuk kesejahteraan masyarakat. Dalam dharma pengabdian kepada masyarakat, perguruan tinggi diharapkan melakukan pelayanan kepada masyarakat untuk ikut mempercepat proses peningkatan kesejahteraan dan kemajuan masyarakat. Melalui dharma pengabdian kepada masyarakat inilah perguruan tinggi juga akan memperoleh umpan balik dari masyarakat tentang tingkat kemajuan dan relevansi ilmu yang dikembangkan perguruan tinggi itu. Keberadaan Perguruan Tinggi mempunyai kedudukan dan fungsi penting dalam pemberdayaan masyarakat.

Pemberdayaan masyarakat diupayakan secara bersama-sama antara perguruan tinggi dan dunia usaha. Keduanya merupakan aset nasional

yang sangat menentukan bagi kemajuan bangsa, terlebih bila ada kerjasama yang saling menguntungkan atau kemitraan. Kerjasama antara perguruan tinggi dan dunia usaha merupakan ajang untuk saling melengkapi sehingga kedua belah pihak bisa tumbuh dan berkembang secara optimal. Pertumbuhan dunia usaha akan turut memacu laju pertumbuhan ekonomi nasional. Dalam hal ini, perguruan tinggi berperan sebagai katalisator. Perguruan tinggi melalui lembaga penelitian dan pengabdian kepada masyarakat, merupakan mitra kerja dunia usaha. Kerjasama perguruan tinggi dengan dunia usaha dapat mengembangkan lebih lanjut bidang pengabdian kepada masyarakat. Dalam pelaksanaan *corporate social responsibility* (CSR) dunia usaha bisa bermitra dengan perguruan tinggi. Pertumbuhan sebuah perusahaan dan perkembangan sebuah perguruan tinggi, juga harus bisa dinikmati oleh masyarakat di sekitarnya. Ketiga elemen inilah yang kemudian bersinergi membentuk konsep pembangunan berkelanjutan.

Dunia usaha adalah salah satu pilar utama dalam sinergi yang sekaligus dapat memberikan dua bentuk dukungan: pendanaan dan non-pendanaan. Apapun bentuk dukungan yang diberikan, dunia usaha berkepentingan langsung untuk memastikan masyarakat berkembang taraf hidupnya, karena hanya dengan berada di tengah masyarakat yang berdayalah dunia usaha dapat berkembang secara berkelanjutan pula. CSR selain menyumbang pada pembangunan berkelanjutan juga suatu bentuk peran serta dunia usaha untuk turut meningkatkan kesejahteraan, pendidikan, ketErampilan, pengetahuan (berbagai aspek sosial, ekonomi dan lingkungan hidup) masyarakat dan lingkugan sekitarnya. Dipandang dari perspektif pembangunan yang lebih luas, CSR menunjuk pada kontribusi perusahaan terhadap konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*), yakni “pembangunan yang sesuai dengan kebutuhan generasi saat ini tanpa mengabaikan kebutuhan generasi masa depan.” Dengan pemahaman bahwa dunia bisnis memainkan peran kunci dalam penciptaan kerja dan kesejahteraan masyarakat, CSR secara umum dimaknai sebagai sebuah cara dengan mana perusahaan berupaya mencapai sebuah keseimbangan antara tujuan-tujuan ekonomi, lingkungan dan sosial masyarakat, seraya tetap merespon harapan-harapan para pemegang saham (*shareholders*) dan pemangku kepentingan (*stakeholders*).

Konferensi Nasional PkM dan CSR ke-3 tahun 2017 diselenggarakan di Kampus Universitas Sebelas Maret Surakarta. Konferensi ini dapat terselenggara berkat kerjasama antar lembaga antara Universitas Sebelas Maret Surakarta, Universitas

Pelita Harapan, Universitas Mulimedia Nusantara dan Universitas Swiss German, Tangerang, yang mengambil tema "Optimalisasi Peran Perguruan Tinggi dan Dunia Usaha dalam Pemberdayaan Masyarakat" merupakan wadah pertemuan dan diskusi bagi akademisi dan praktisi dari perguruan tinggi, dunia usaha, dan para pihak lain untuk meningkatkan perannya dalam usaha pemberdayaan masyarakat dan menjalankan tanggung jawab sosial perusahaan.

Kegiatan konferensi ini diikuti oleh 150 orang peserta dan 100 pemakalah yang akan membagikan pengalaman dan pembelajarannya dalam kegiatan pemberdayaan masyarakat dan tanggung jawab sosial perusahaan. Makalah yang disampaikan dalam Konferensi Nasional PkM dan CSR ke-3 tahun 2017 dirangkum dalam 3 buah buku prosiding yang, yaitu buku pertama bidang Ekonomi, Sosial, Budaya, dan Kesehatan; buku kedua bidang Teknologi Tepat Guna dan Pendidikan; buku ketiga bidang Teknologi Informasi, Komunikasi, dan Lingkungan. Buku prosiding hasil Konferensi ini diharapkan dapat menjadi sarana berbagi dan belajar mengenai kegiatan pengabdian kepada masyarakat dan CSR yang diselenggarakan berbagai pihak dalam rangka untuk pemberdayaan masyarakat untuk kesejahteraan bangsa.

Ketua Panitia

PkM dan CSR 2017

DAFTAR ISI

Kata Pengantar Iv
Daftar Isi Vii

PEMANFAATAN BOTOL PLASTIK BEKAS UNTUK MEDIA SISTEM TANAM VERTIKULTUR SEBAGAI PELATIHAN TANAM SAYURAN KELOMPOK DASA WISMA DESA MARGO MAKMUR KAB. MESUJI 1
Dedi Putra dan Neneng Rulianti

PENINGKATAN KAPASITAS PRODUKSI KOPI BUBUK SUOH MELALUI PEMANFAATAN IPTEKS DI SUOH, LAMPUNG BARAT 15
Nurfiana, Sri Karnila, dan Hendra Kurniawan

PENERAPAN TEKNOLOGI BIOTRICHOPORASI DALAM MENINGKATKAN KWALITAS BIBIT KOPI LIBERIKA TUNGKAL JAMBI DI DESA SERDANG JAYA 28
Gusniwati, Elis Kartika, Lizawati, dan Made Deviani

PEMBERDAYAAN KELUARGA MELALUI USAHA BUDIDAYA DAN PENGOLAHAN TOGA MENJADI MINUMAN SEHAT PADA POSDAYA TABLIGH KELURAHAN TEJOSARI KECAMATAN METRO TIMUR KOTA METRO 38
Handoko Santoso

PEMANFAATAN MIKROORGANISME PADA PENGOLAHAN LIMBAH KANDANG UNTUK MENGATASI PENYAKIT KOPI LIBERIKA (KASUS KKN-PPM DI KECAMATAN BETARA) 47
Elis Kartika, Gusniwati dan Lizawati

COTUVER PEMBUATAN DONAT TRADISIONAL MENGGUNAKAN IPTEK MESIN PADA USAHA SUSI DONAT DAN ERA DONAT DI TABING KOTA PADANG 59
Idwar, Alvin Alfian, YofinaMulyati, EnnyArita

PENGGUNAAN KONDENSOR TAMBAHAN DAN SEPARATOR DILENGKAPI KACA DUGA PADA UKM PENYULINGAN CENGKEH DAN NILAM WONOKOYO 72
Windi Atmaka, Lia Umi Khasanah, Kawiji, Godras Jati Manuhara, Rohula Utami, Adhitya Pitara Sanjaya

PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DALAM MENGOLAH LIMBAH MENJADI PUPUK DAN INSEKTISIDA DAN PENERAPANNYA PADA TANAMAN PADI 84
Made Deviani Duaja, Johannes, dan Buhaira

TART GULUNG UBI UNGU 93
Nurbaya Busthanul Heliawaty Nurdin Lanuhu dan Layla Ramadhani Husain P.

PENGEMBANGAN UNIT USAHA KAMPUS "VIRTUAL LAW OFFICE" 109
Budi Endarto, Fitra Mardiana, dan M. Harist Murdani

IMPLEMENTASI *GREEN ECONOMY* MELALUI PEMANFAATAN LIMBAH RUMAH TANGGA SEBAGAI USAHA PRODUKTIF DI POLANHARJO KABUPATEN KLATEN 124
Nurul Istiqomah, Izza Mafruhah, dan Evi Gravitiani

PEMANFAATAN LIMBAH AYAM SEBAGAI PUPUK ORGANIK DI UKM PETERNAKAN AYAM "TUMBUH TEPAT" DESA NGADIREJO, MOJOGEDANG, KARANGANYAR 135
Mujiyo, Sumarno, dan Suryono

PEMBERDAYAAN USAHA MAKANAN TRADISIONAL MELALUI INTRODUKSI TEKNOLOGI TEPAT GUNA 143
Jonet Ariyanto Nugroho, Leny Noviani, dan Suharno

PEMBINAAN INOVASI DAN KREATIVITAS MASYARAKAT HOME INDUSTRI KACANG SANGRAI DI KRANGGAN - TANGSEL, BANTEN 153
Tukhas Shilul Imaroh, Hapzi Ali, dan Arifatul Bahirah

USAHA MIKRO WORKSHOP KAYU DALAM MENGEMBANGKAN KITCHEN SET SEBAGAI DESAIN INTERIOR RUMAH 172
Anis Rahmawati dan Ida Nugroho Saputro

KARAKTERISASI PICKUP GITAR ELEKTRIK PRODUK RADIX 181
Ihan Martoyo, Joshua Hutabarat, Herman Kanalebe, Junita

PENGEMBANGAN LAMPU PJU BERTENAGA SURYA *OFF-GRID* UNTUK EDUKASI LINGKUNGAN DAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT TANGERANG DAN TANGERANG SELATAN 202
Henri P. Uranus, Endrowednes Kuantama, Mario Gracio A. Rhizma, Kuniwati

PEMANFAATAN POTENSI LOKAL SEBAGAI BAHAN BAKU SOUVENIR DI PANTAI KRAKAL 221
Nurmiyati, Murni Ramli, Yudi Rinanto, Muzzazinah

PELATIHAN PENGEMBANGAN DESAIN PRODUK KERAJINAN KERAMIK DI SENTRA KERAMIK KEBON JAYANTI KECAMATAN KIARACONDONG BANDUNG 232
Atin Hafidiah

PERBAIKAN PROSES DAN KEMASAN TAHU PONG PRODUKSI UKM AL AMIN DI KECAMATAN KARANGPANDAN KABUPATEN KARANGANYAR 248
NHR Parnanto, L.U. Khasanah, dan D. Ishartani

IbM GURU-GURU SMK TEKNIK BANGUNAN MELALUI PENDAMPINGAN PENYUSUNAN BUKU AJAR 257
Sri Sumarni

PENGUATAN KELOMPOK NELAYAN MELALUI KOPERASI DI KABUPATEN PANDEGLANG 266
Kusumajanti, Ni Putu Eka Widiastuti, dan Asep Kamaluddin

PELATIHAN MANAJEMEN KEUANGAN UNTUK MENINGKATAN KEMAMPUAN TENANT DALAM MENGELOLA KEUANGAN USAHANYA PADA PROGRAM IPTEK BAGI KEWIRAUSAHAAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 282
Nihlatul Qudus Nirwana Sukma,Wiwik Sulistiyowati, dan Ida Agustina Saidi

POTENSI JANGGELAN SEBAGAI PRODUK UNGGULAN DI PACITAN 291
Supriyadi, Sumani, Joko Winarno, Halwa Latief Naja

PENINGKATAN KUALITAS PRODUK USAHA TENANT MELALUI PELATIHAN DESAIN PRODUK PADA PROGRAM IPTEK BAGI KEWIRAUSAHAAN DI UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SIDOARJO 300
Wiwik Sulistiyowati

PERAN "SERVICE LEARNING COMMUNITY" DALAM MENGAPLIKASIKAN KEPEMIMPINAN TRANSFORMATIF MELALUI PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT 305
David Christian dan Andry M. Panjaitan

PERAN SERTA MAHASISWA UNIVERSITAS PELITA HARAPAN MELALUI PROGRAM "SERVICE LEARNING PROYEK" DALAM PEMBERDAYAAN MASYARAKAT 320
Kusuma Wardhani dan Tikno Iensufiie

PENGEMBANGAN USAHA MELALUI PELATIHAN DAN PENDAMPINGAN BAGI USAHA TELUR ASIN DERWATI KOTA BANDUNG 335
Siti Patimah

PENDIDIKAN KEUANGAN DAN PENGETAHUAN KEPEMIMPINAN BAGI GENERASI MUDA 345-350
Margaretha Lingga

PENGEMBANGAN UNIT USAHA KAMPUS "VIRTUAL LAW OFFICE"

Budi Endarto[1], Fitra Mardiana[2], M. Harist Murdani[3]

[1] Program Studi Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Wijaya Putra
[2] Program Studi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Wijaya Putra
[3] Program Studi Teknologi Informasi, Fakultas Teknik, Universitas Wijaya Putra
[1]budiendarto@uwp.ac.id

ABSTRAK

Virtual Law Office (VIRLO) merupakan unit usaha yang dikembangkan oleh Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra sebagai respon terhadap arus pergeseran teknologi infomasi dan komunikasi yang mempengaruhi sendi kehidupan masyarakat di segala bidang temasuk layanan jasa hukum. Terlebih kebutuhan masyarakat bisnis dewasa ini juga menghendaki layanan jasa hukum yang efisien untuk itu dengan kehadiran VIRLO diharapkan dapat memenuhi ekspektasi tersebut. Tujuan dari program ini adalah memenuhi kebutuhan layanan jasa hukum bagi masyarakat bisnis berbasis teknologi infomasi dengan mengedepankan prinsip efektif dan efisien dalam memberikan layanan jasa hukum dengan tidak meninggalkan aspek profesionalisme. Indikator capaian yang menjadi tujuan program pengembangan unit usaha kampus berupa kantor hukum virtual adalah 1) terbangunnya sistem informasi VIRLO; 2) terbentuknya unit usaha virlo; 3) terbentuknya laboratorium hukum; 4) meningkatkan layanan jasa hukum secara efisien dan 5) meningkatnya pendapatan lembaga yang bersumber dari pemberian layanan jasa hukum kepada masyarakat bisnis berbasis teknologi informasi. Metode pelaksanaan yang digunakan adalah melalui sosialisasi, pelatihan, konsultasi dan advokasi layanan jasa hukum berbasis teknologi informasi. Hasil yang diharapkan dari program ini adalah 1) Pengembangan dan penggunaan sistem informasi *virlo*; 2) Pembentukan unit usaha layanan jasa hukum berbasis teknologi informasi; 3) Terbentuknya laboratorium hukum berbasis teknologi informasi; 4) Peningkatan layanan jasa hukum berbasis teknologi informasi dan 5) Peningkatan pendapatan lembaga yang bersumber dari pemberian layanan jasa hukum berbasis teknologi infomasi.

Kata Kunci: Sistem Informasi, Layanan Jasa Hukum, Virtual Law Office

PENDAHULUAN

Dalam perspektif praktis khususnya terhadap pergeseran profesi lawyers kedepan, Richard Susskind dalam bukunya *The End of Lawyers? Rethinking The Nature of Legal Services*, telah memprediksi bahwa "*For many lawyers, therefore, it looks as*

if the party may soon be over. Dalam upaya mengantisipasi permintaan pasar, menurut Susskind ada dua jalan untuk merubahnya yaitu:

1. *New methods, system, and processes will emerge to reduce the cost of undertaking routine legal work.*
2. *By the market will be for clients, in various ways to share the costs of legal services. (*Richard Susskind: 2008)

Pesan yang dapat ditangkap dari pemikiran Susskind tersebut adalah dominasi kantor hukum besar yang menjalankan layanan jasa hukum secara konservatif lambat laun akan tergeserkan dengan kantor hukum yang menjalankan aktivitas layanannya secara efektif dan efisien. Pandangan yang lebih komprehensif disampaikan Richard Granat dan Stephanie Kimbro, yang menyatakan bahwa pergeseran profesi hukum dan pengajaran hukum dalam beberapa dekade terakhir, salah satunya didorong dengan pertumbuhan teknologi informasi dan komunikasi. Untuk mempersiapkan lulusan yang siap kerja, dewasa ini tidak hanya cukup dibekali dengan pemahaman tentang prinsip-prinsip yang berkaitan dengan substansi hukum saja akan tetapi juga harus dibekali dengan pengetahuan tentang manajemen praktis dalam era digital sebagaimana dinyatakan:

> *During the last decade, the rise of the internet has caused systemic changes in the way lawyers practice law. It has altered the demand for legal services from lawyers, which in turn, has impacted the employment prospects for lawyers. When a large percentage of graduating law students are faced with the prospect of starting their own practice upon graduation, rather than working as a lawyers for someone else, the need for being "practice-ready" upon graduation is now an imperative. Being "practice-ready"means more than just learning the principles of substantive law- it also means having essential knowledge in law practice management in a digital age which will become the basis for a successfull law career as private practitioners.* (Richard S Granat And Stephanie Kimbro; 2013)

Pandangan-pandangan itu juga sejalan dengan Jeanne Eicks, yang melihat dampak dari berkembangnya teknologi informasi terhadap seluruh sendi kehidupan termasuk pendidikan hukum dan praktek hukum sebagai berikut:

The impact of technology have been felt in all legal profession, from legal education to government to the practice of law.

Selanjutnya Eicks juga menyatakan bahwa:

"… to educate future we must discover learn how legal innovators currently leverage technology and make technical abilities of those innovators the baseline for law school curriculum reform". (Jeanne Eicks;2012)

Sebagai upaya menyikapi perkembangan dan pergeseran layanan jasa hukum sebagaimana disebutkan diatas, Fakultas Hukum Universitas Wijaya Putra melalui Program PPUPIK mengembangkan Kantor Hukum Virtual atau Virtual Law Office ("VIRLO"). VIRLO dikembangkan melalui program yang dibiayai oleh Kemenristek Dikti mulai tahun 2016. Orientasi VIRLO terletak pada layanan jasa hukum yang berbasis teknologi informasi dan komunikasi.

Keberadaan VIRLO pada akhirnya juga diharapkan dapat mempengaruhi orientasi pengajaran hukum pada fakultas hukum UWP dimana saat ini telah disusun perubahan kurikulum yang berhubungan dengan *Law Practice Management* dan *Law Pratice Technology*. Dalam konteks pengembangan *Law Practice Management*, FH UWP telah memformulasikan kembali konten mata kuliah pengelolaan kantor hukum sebagai upaya peningkatan pengetahuan peserta didik.

Sedangkan dalam upaya pengembangan Law Practice Technology dilaksanakan melalui pendirian kantor hukum virtual (VIRLO). Keberadaan VIRLO diharapkan dapat mengimplementasikan konsep *legal praxis* sebagai perwujudan dari lembaga pendidikan hukum praktis di FH UWP. Disamping itu, VIRLO diharapkan akan menjadi laboratorium bagi Dosen dan mahasiswa khususnya yang berkaitan dengan praktik hukum non litigasi. Dengan demikian keberadaan VIRLO, harus lebih diorientasikan pada aspek komersialnya dengan memberikan layanan jasa hukum kepada perusahaan yang membutuhkan. Hal ini merupakan implementasi prinsip keseimbangan disamping aspek sosial sebagaimana esensi keberadaan dosen yang berprofesi sebagai advokat, karena pada dasarnya profesi advokat merupakan suatu profesi yang mulia atau *officium nobile.* Karena pada dasarnya secara ideal keberadaan advokat adalah memberi bantuan hukum yang merupakan tanggung jawab sosial (*social contribution and social liability*) dari para advokat.

Layanan jasa hukum yang relevan untuk diberikan kepada perusahaan oleh VIRLO adalah uji tuntas dari segi hukum (*legal due diligence*) dan drafting atau review terhadap kontrak-kontrak komersial. Hal ini juga mengantisipasi generasi milineal yang akan semakin banyak mengelola perusahaan-perusahaan baru (*start up company*) yang memerlukan efisiensi dalam pengelolaanya. Efisiensi pengelolaan kegiatan usaha harus didukung dengan efisiensi supporting system termasuk di bidang hukum. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa keberadan VIRLO

merupakan terobosan kreatif untuk mengantisipasi pergerakan pengelolaan usaha modern dimana segala aktifitas bisnisnya berbasis pada teknologi informasi yang membutuhkan kecepatan, ketepatan dan efisien.

Disamping itu, kegiatan ini merupakan upaya meningkatkan inovasi yang mempunyai nilai ekonomis dalam kerangka penyebarluasan budaya *knowledge based economy* serta dapat mendatangkan income (*revenue generating*) bagi UWP. Dengan dikembangkannya VIRLO, juga diharapkan sebagai wahana peningkatan nilai akademis hasil penelitian dan pengabdian masyarakat yang dapat dikomersialisasikan, meningkatkan kepakaran dan kompetensi staf pengajar, menumbuhkan inovasi dan kreativitas kampus khususnya di bidang layanan jasa hukum. Kata kunci yang diharapkan adalah membuat terobosan kreatif dan inovatif dalam hal layanan jasa hukum yang belum banyak dilakukan oleh konsultan hukum di Indonesia. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa sebagai upaya mengantisipasi perkembangan teknologi informasi dimana seluruh aktifitas manusia termasuk layanan jasa hukum kedepan akan berbasis virtual atau The Future is "*Virtually*" termasuk didalamnya *Virtual Law Consultans* dan *Virtual Interactions*, merupakan salah satu kekuatan dari VIRLO, sehingga pada gilirannya diharapkan lulusan dari mahasiswa UWP khususnya Fakultas Hukum memiliki kemampuan dalam melakukan kegiatan layanan jasa hukum berbasis pada teknologi informasi.

Sampai dengan tahun kedua ini, pelaksanaan kegiatan VIRLO diorientasikan pada penyempurnaan sistem informasi dan segala komponen pendukungnya, namun tidak mengurangi intensitas penanganan layanan jasa hukum maupun pengembangan klien baru. Penanganan layanan jasa hukum yang dilaksanakan di tahun kedua dilakukan baik melalui kerjasama dengan kantor hukum lainnya atau juga dilakukan secara mandiri.

Sebagai laboratorium Fakultas Hukum UWP, VIRLO dirancang untuk:

1. Memberikan layanan jasa hukum di bidang konsultasi hukum (non litigasi) baik perancangan dan review kontrak, legal due delligence (legal audit dan legal opinion) berbasis virtual;
2. Memfasilitasi mahasiswa fakultas hukum dalam melakukan magang praktek hukum, dengan mengikutsertakan mahasiswa dalam praktek proses pemberian layanan jasa hukum non litigasi.

Sedangkan tujuan program VIRLO yang di kembangkan oleh FH UWP antara lain:

1. Mendidik dan membina calon wirausaha baru di bidang hukum bagi mahasiswa dan calon alumni FH UWP;
2. Mengembangkan sumber pendapatan bagi dosen dengan memberikan layanan jasa hukum;
3. Membangun jaringan dengan Fakultas Hukum dari Perguruan Tinggi lainnya;
4. Membangun jaringan dengan kantor-kantor hukum untuk mengimplementasikan layanan jasa hukum virtual;
5. Membantu pemerintah dalam mempersiapkan lulusan fakultas hukum UWP agar memiliki kompetensi dan siap kerja yang relevan di bidang hukum.

Untuk memberikan gambaran tentang keberadaan VIRLO, disamping sebagai wahana komersialisasi pengetahuan dan pengalaman serta ketrampilan yang dimiliki oleh para Tenaga Pendidik FH UWP pada jasa di bidang hukum, juga dalam kerangka memenuhi kebutuhan layanan jasa hukum masyarakat bisnis yang menghendaki layanan jasa hukum yang efektif dan efisien. Untuk memperjelas gambaran keberadaan VIRLO disajikan dalam gambar 1 dibawah ini.

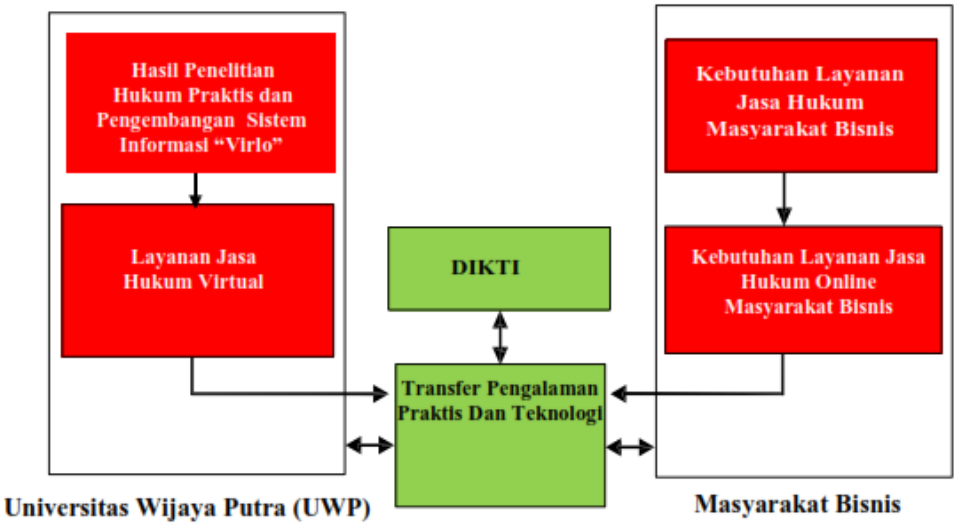

Gambar 1. Hubungan Timbal Balik Antara VIRLO-UWP Dengan Masyarakat Bisnis

METODE

Layanan Jasa Hukum

Program ini dilaksanakan kolaborasi beberapa dosen yang berasal dari berbagai disiplin ilmu, baik Ilmu Hukum, Manajemen dan Teknik Informatika. Anggota tim yang berasal dari disiplin Ilmu Hukum merumuskan bidang-bidang layanan jasa hukum, menyusun alur layanan jasa hukum untuk di implementasikan dalam system informasi, serta melaksanakan akitifitas pemasaran dan pemberian layanan jasa hukum. Pada tahap awal terdapat 2 (dua) bentuk layanan jasa hukum sesuai dengan peranan dan fungsi Konsultan Hukum dalam suatu kegiatan bisnis yakni:

1. *Contract drafting and review*

   Di dalam suatu kegiatan bisnis fungsi *Advisor* atau *Legal Consultant* sangat diperlukan guna memberikan pendapat dan pertimbangan-pertimbangan hukum yang tepat berikut jalan keluar yang diperlukan dalam pemecahan suatu permasalahan yang dihadapi oleh pelaku bisnis, membuat *drafting* atau *review* suatu perjanjian dan memberikan pendapat atas peraturan perundang-undangan dan atau peraturan pemerintah lainnya yang dirasakan dapat berpengaruh langsung terhadap kegiatan bisnis berikut saran dan pendapatnya untuk mendapatkan solusi yang terbaik dari permasalahan yang dihadapi oleh suatu perusahaan.

2. *Legal Due Diligence*

   Merupakan keahlian seorang ahli hukum dalam memberikan layanan jasa hukum berupa pemeriksaan secara seksama dari segi hukum terhadap suatu perusahaan atau obyek transaksi sesuai dengan tujuan transaksi untuk memperoleh informasi atau fakta material yang dapat menggambarkan kondisi suatu perusahaan atau obyek transaksi.

Bentuk layanan jasa hukum yang disajikan oleh VIRLO selain mempertimbangkan kebutuhan pasar juga berdasarkan ketrampilan dan lisensi yang dimiliki oleh ketua tim VIRLO. Ketua Tim VIRLO telah berpengalaman dan memiliki lisensi sebagai Konsultan Hukum Pasar Modal sejak tahun 1997. Selama kurang lebih 20 (dua puluh) tahun telah berpengalaman menjalankan perannya sebagai profesi penunjang di pasar modal bidang hukum.

Rancangan Proses Layanan Jasa Hukum VIRLO

Anggota dari disiplin ilmu Teknik Informatika merumuskan rancangan proses layanan jasa hukum VIRLO. Sebagai usaha di bidang layanan jasa hukum, ujung tombak adalah pelayanan prima (*excellent service*). Aliran usaha harus dibuat secara terintegrasi dari mulai registrasi, akses login, penentuan lawyer yang kompeten, pengiriman dokumna, penangan layanan jasa hukum sampai pelaporan dan penyerahan layanan jasa hukum. Untuk memastikan pengendalian proses pemberian layanan jasa hukum yang berkualitas disajikan alur proses layanan jasa hukum sebagaimana diuraikan dalam gambar 2 berikut:

Gambar 2. Alur Proses Layanan Jasa Hukum VIRLO

Sistem penjaminan mutu yang diterapkan dalam VIRLO antara lain melalui; supervisi yang dilakukan secara periodik dalam proses pemberian layanan jasa hukum. Penerapan SOP sebagaimana ketentuan mengenai kode etik profesi dan ketentuan yang diatur di dalam Undang-Undang Advokat. Kedepannya kami merencanakan penyusunan standar layanan jasa hukum dan hubungan relasi secara online antara konsultan hukum dengan klien yang berpatokan pada kode etik advokat yang berlaku, sebagaimana gambar 1 di atas.

Penggunaan Teknologi Sistem Informasi pada VIRLO

Sistem informasi yang di gunakan VIRLO adalah suatu sistem yang mempertemukan kebutuhan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasasi, dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diperlukan lihat Gambar 3.

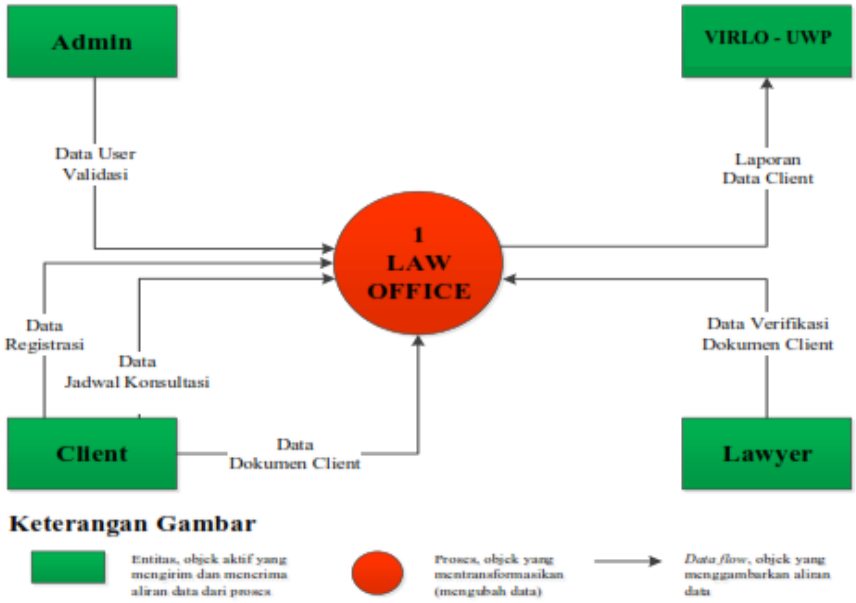

Gambar 3. Diagram alur Proses Penggunaan Sistem Informasi VIRLO

Analisis kelemahan sistem informasi yang dirancang untuk VIRLO dilakukan untuk mencari kelemahan-kelemahan yang terdapat dalam sistem yang sedang digunakan (yang sedang berjalan). Dari analisis ini akan dapat ditemukan beberapa masalah atau kendala-kendala yang menyebabkan sistem menjadi tidak bekerja secara maksimal, sehinggal hal-hal tersebut harus segera dicarikan solusi permasalahannya. Selain itu dalam sistem informasi ini, diperlukan alat ukur untuk menganalisa kelemahan dengan melihat beberapa faktor diantaranya adalah pengukuran pekerjaan, kehandalan, teknologi, laporan dan dokumentasi, lihat gambar 4.

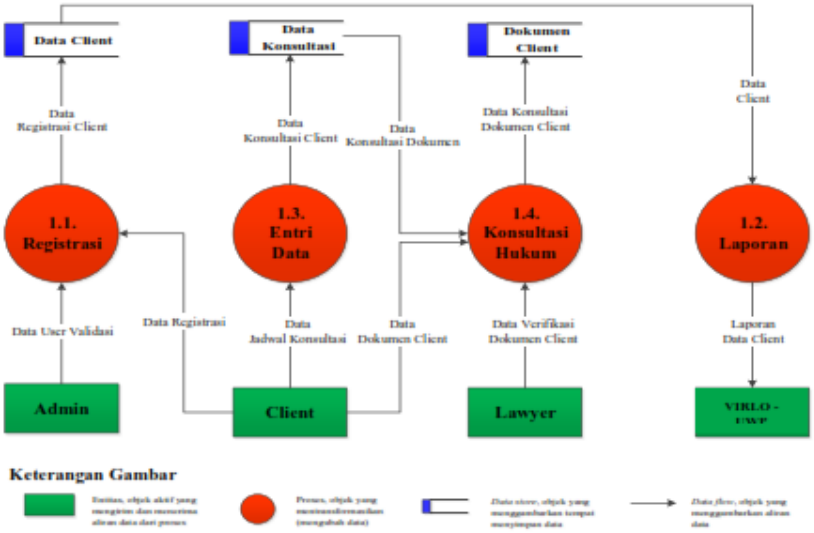

Gambar 4. Diagram Alur Sub Proses Penggunaan Sistem Informasi VIRLO

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pelaksanaan program VIRLO dalam 2 (dua) tahun ini telah menghasilkan beberapa kegiatan untuk menunjang tercapainya seluruh program PPUPIK sebagaimana yang direncanakan. Beberapa kegiatan yang telah dilaksanakan dalam satu tahun ini adalah sebagai berikut:

Pembangunan Portal, Sistem Informasi Jasa Hukum Virtual dan Virtual Data Room

Tahapan pembangunan teknologi informasi virtual law office dimulai dengan pembangunan website dengan alamat virlo.id sebagai Client Portal. Di dalam client portal, disajikan beberapa informasi antara lain profile law firm, profile konsultan hukum, layanan jasa hukum dan sistem informasi layanan jasa hukum.

Client portal dibangun dengan melakukan kustomisasi aplikasi CMS Open Source yang cukup populer, yakni Wordpress. Wordpress menggunakan PHP sebagai bahasa pemrogramannya dan MySQL sebagai backend database. Client portal berfungsi sebagai titik awal interaksi antara praktisi hukum dan potensial client.

Sistem Informasi VIRLO yang dibangun sebagai laboratorium virtual memiliki kemiripan dengan client portal, yakni online, berbasis web, menggunakan PHP

sebagai bahasa pemrograman dengan Laravel sebagai framework yang dipilih. Adanya perbedaan dengan client portal ada pada pilihan aplikasi database yang digunakan, yakni PostgreSQL dengan harapan bahwa fitur yang ada dalam database tersebut mampu memenuhi kebutuhan VIRLO yang cukup kompleks. Walaupun database yang digunakan berbeda, keduanya merupakan aplikasi Open Source.

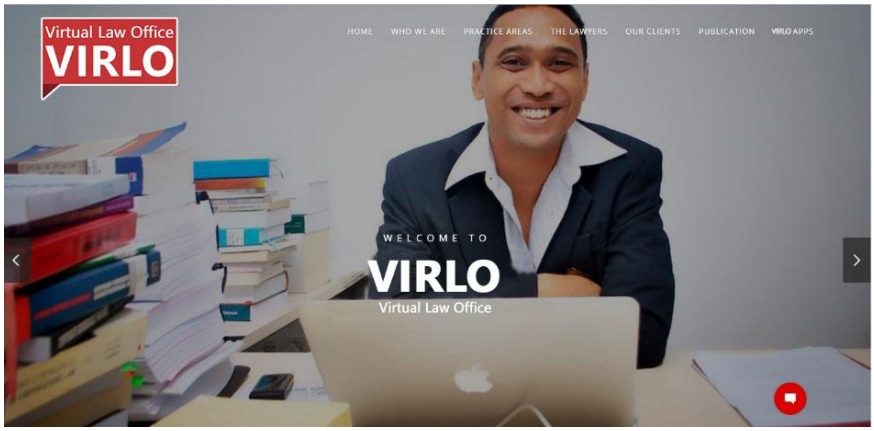

Gambar 5. Front Page di www.virlo.id

Sistem Informasi VIRLO yang dibangun sebagai laboratorium virtual memiliki kemiripan dengan client portal, yakni online, berbasis web, menggunakan PHP sebagai bahasa pemrograman dengan Laravel sebagai framework yang dipilih. Adanya perbedaan dengan client portal ada pada pilihan aplikasi database yang digunakan, yakni PostgreSQL dengan harapan bahwa fitur yang ada dalam database tersebut mampu memenuhi kebutuhan VIRLO yang cukup kompleks. Walaupun database yang digunakan berbeda, keduanya merupakan aplikasi Open Source.

Selanjutnya alur penanganan layanan jasa hukum secara online dikembangkan berdasarkan arsitektur pengembangan teknologi informasi. Aliran usaha dibuat secara terintegrasi dengan proses pengendalian kualitas layanan jasa hukum.

Untuk menjaga kerahasiaan client dan informasi penting yang terkait, pada setiap alur layanan jasa hukum selalu diawali dengan proses Log In - memasukkan username dan password ke dalam sistem informasi VIRLO. Proses login ini berlaku untuk semua client dan lawyer beserta petugas administrasi serta Managing Partners Law Office.

Upaya untuk mempermudah penggunaan system informasi VIRLO saat ini telah dilakukan pengembangan baik dari segi desain maupun fasilitas –fasilitas menu

untuk memudahkan penggunaan system informasi. Fasilitas yang dikembangkan pada tahun kedua antara lain *User Guide for Client* yakni petunjuk penggunaan fasilitas untuk klien agar mempermudah upload dokumen, mengetahui perkembangan layanan jasa hukum serta komunikasi dengan lawyer. Tampilan *User Guide for Client* disajikan pada gambar 6.

Gambar 6. User Guide Client

Sedangkan *User Guide for Lawyer* dikembangkan sebagai pedoman bagi lawyer menyimpan dokumen, menelusuri dokumen dan mengupload hasil perkerjaan layanan jasa hukum serta melakukan komunikasi dengan klien yang berhubungan dengan perkembangan layanan jasa hukum. Tampilan *User Guide for Lawyer* disajikan pada gambar 7.

Gambar 7. User Guide Lawyer

Virtual Data Room (VDR) merupakan alternatif penyimpanan dokumen client yang bertujuan untuk menjaga kerahasiaan dokumen, dimana dokumen yang telah diupload hanya bisa diakses oleh yang berkepentingan saja. Pengembangan VDR untuk menggantikan traditional paper data room dengan menggunakan akses internet dan proses login menggunakan user name dan password, sehingga lawyer dan team dapat mengakses secara bersamaan. VDR system memiliki keunggulan di

bandingkan dengan traditional data room baik dari waktu transaksi, mengurangi pengeluaran dan para lawyer dapat melakukan perkerjaan secara bersama-sama. Untuk menjaga keamanan data klien dibangun server yang dirancang dengan sistem penyimpanan yang tidak menggunakan *cloud-storage* akan tetapi berbasis *local storage*. Sehingga akses penuh terhadap file ada pada law-firm dan bukan pada pihak ketiga semisal Dropbox atau Amazon S3.

Sosialisasi Internal dan Eksternal

Sosialisasi merupakan salah satu bentuk promosi mengenai keberadaan unit VIRLO kepada masyarakat umum baik di internal UWP maupun eksternal UWP. Sampai dengan tahun kedua keberadaan VIRLO telah dilakukan sosialisasi keberadaan VIRLO baik di lingkungan internal maupun eksternal UWP. Pada lingkungan internal, sosialisasi dilaksanakan pada tanggal 3 Juli 2017 yang dikemas dalam suatu seminar yang bertajuk "*Legal Due Diligence & Virtual Law Office Services*" dengan Budi Endarto sebagai narasumber. Seminar yang dihadiri oleh Dosen dan Mahasiswa Fakultas Hukum UWP pada intinya memperkenalkan *legal due diligence* sebagai salah satu keahlian hukum praktis. Sebagai salah satu keahlian hukum yang seyogjanya dimiliki oleh lulusan fakultas hukum untuk itu wajib di pelajari agar siap ketika mahasiswa lulus sebagai sarjana hukum memiliki pengetahuan dan bekal ketrampilan *legal due diligence*.

Sedang sosialisasi lingkup eksternal pada tahun kedua program PPUPIK ini telah dilaksanakan baik terhadap klien, calon klien maupun beberapa law firm yang memberikan layanan jasa hukum *legal due diligence* maupun *legal drafting*. Sosialisasi terhadap klien dan calon klien dilaksanakan sekaligus sebagai penerapan layanan jasa hukum berbasis virtual agar lebih familier dalam penggunaan teknologi informasi. Kepada beberapa law firm yang memberikan layanan jasa hukum legal due diligence maupun legal drafting, diharapkan menggunakan system informasi yang dikembangkan oleh VIRLO. Dengan menggunakan sistem informasi yang dikembangkan oleh VIRLO, maka akan berkembang komersialisasi dari hanya layanan jasa hukum menjadi pengembangan komersialisasi system informasi.

Pemasaran

Sebagai usaha jasa dalam hal ini layanan jasa hukum, kunci keberhasilan pemasaran adalah adanya kepercayaan dari klien atau calon klien terhadap eksistensi advokat atau kantor hukum itu sendiri. Untuk itu berbeda dengan produk jasa lainnya, layanan jasa hukum faktor kepercayaan adalah yang utama. Demikian juga aspek pemasaran dari layanan jasa hukum sangat berbeda dengan produk riil maupun jasa

lainnya. Meskipun cenderung terkesan lambat dalam perkembangannya, sektor layanan jasa hukum harus membangun reputasi dan profesionalitasnya untuk mendapat kepercayaan dari masyarakat.

Peluang Mendapatkan HAKI

Hak atas Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan hak eksklusif yang diberikan pada inventor baik berupa desain industri, paten maupun hak cipta. Pada dasarnya HKI merupakan hak privat (private right) dan memiliki nilai ekonomis bagi pemegang haknya. Beberapa produk dari KHV-UWP yang berpeluang mendapatkan sertifikat HKI antara lain sertifikat Hak Cipta untuk system informasi konsultan hukum virtual, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan konsultan hukum serta buku ajar. Selain itu potensi mendapatkan HKI pada program PPUPIK KHV dapat juga melalui sertifikat Hak Merek untuk domain names kantor hukum virtual yaitu *virlo.id*.

HKI merupakan salah satu bentuk penghargaan berupa perlindungan hak atas suatu benda yang bersumber dari hasil kerja otak (intelektual), termasuk didalamnya adalah rangkaian system informasi kantor hukum virtual dan SOP pengelolaan konsultan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Hak Cipta nomer 24 tahun 2014 maka software, SOP dan buku ajar adalah bagian dari ciptaan. Peluang mendapatkan Sertifikat Hak Cipta untuk system informasi, SOP dan buku ajar tersebut sangat terbuka karena syarat untuk mendapatkan perlindungan Hak Cipta dari Negara berupa sifat khas dan originalitas, serta berada di wilayah ilmu pengetahuan telah terpenuhi. System informasi konsultan hukum virtual, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan konsultan hukum dan buku ajar merupakan hasil olah pikir otak dan kerja intelektual yang original serta bersifat khas.

Salah satu faktor penting yang harus dilakukan oleh seseorang atau badan hukum dalam memanfaatkan jaringan internet baik untuk tujuan komersial ataupun tidak adalah membuat alamat situs web-nya di internet. Alamat tersebut berfungsi sebagai media penghubung antara seseorang atau badan hukum yang memasang informasi dalam situs web internet dengan pemakai jasa internet. Dalam istilah internet, alamat situs web tersebut dinamakan domain names. Seiring dengan perkembangan pemakaian domain names oleh perusahaan di jaringan internet, berkembang pula pelanggaran hak merek di jaringan tersebut. Pelanggaran ini terjadi saat pihak lain yang tidak ada sangkut pautnya dengan sebuah perusahaan, mendaftarkan merek tersebut sebagai domain names di jaringan internet. Agar hal ini tidak terjadi maka

domain names dengan merek virlo.id akan didaftarkan pada Dirjen HKI untuk mendapatkan perlindungan hak merek dari negara.

SIMPULAN DAN SARAN

Simpulan

Berdasarkan hasil dan pembahasan yang berkaitan dengan kegiatan VIRLO, dapat disimpulkan hal-hal sebagai berikut:

1. Tahapan pembangunan teknologi informasi virtual law office dimulai dengan pembangunan website, system informasi dan virtual data room, merupakan langkah awal yang harus dilaksankan pada tahap pertama;
2. Untuk mempermudah penggunaan system informasi VIRLO selain sosialisasi dan pelatihan baik kepada klien maupun lawyer, pernyusunan User Guide for Client dan User Guide for Client yang juga mempermudah penggunaan serta peningkatan komunikasi berbasis sitem informasi VIRLO ;
3. Terdapat beberapa produk yang memiliki peluang mendapatkan Hak Atas Kekayaan Inteletual dari program VIRLO baik berupa Hak Cipta atau Hak Merek antara lain dan System informasi konsultan hukum virtual, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan konsultan hukum dan buku ajar, domain names dengan merek virlo.id akan didaftarkan pada Dirjen HKI untuk mendapatkan perlindungan hak cipta dan merek dari negara.

Saran

Agar dapat meningkatkan kinerja dan perluasan layanan jasa hukum, maka diperlukan perbaikan manajemen usaha yang disusun secara terstruktur dan terencana:

1. Perencanaan-perencanaan manajemen pengelolaan VIRLO antara laian, production planning, accounting bookkeeping dan auditing untuk meningkatkan kinerja dan akuntabilitas;
2. Pengembangan secara terus menerus system informasi untuk meningkatkan kinerja dan layanan jasa hukum secara efektif dan efisien;
3. Peningkatan pendidikan dan pelatihan bagi lawyer dan staf VIRLO secara terencana dan berkelanjutan sebagai upaya memperbaiki kualitas layanan jasa hukum;

4. Menyegerakan mendaftarkan hak cipta dan merek beberapa produk dari program VIRLO seperti system informasi konsultan hukum virtual, Standar Operasional Prosedur (SOP) pengelolaan konsultan hukum dan buku ajar, domain names dengan merek virlo.id agar mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum.

DAFTAR REFERENSI

Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal (Capital Market Legal Consultants Association), 2012, Professional Standards of Capital Market Legal Consultants Association (*Standar Profesi Himpunan Konsultan Hukum Pasar Modal), Appendix of Decree of HKHPM No.04/HKHPM/XII/2012*, Jakarta.

Lajoux, Alexandra Reed, 2010, *The Art Of M& A Due Diligence, Navigating Critical Steps and Uncovering Crucial Data*, Mc Graw Hill, New York.

Spedding, Linda. S, 2009, *Due Diligence Handbook, Corporate Governance, Risk Management and Business Planning*, Cima Publishing, Hungary.

Granat, Richard S And Stephanie Kimbro, *The Teaching Of Law Practice Managemement And Technology in Law School: A New Paradigm*, 2013, Chicago-Kent Law Review, Volume 88, Issue 3 Justice, Lawyering and Legal Education in the Digital Age.

Susskind, Richard, 2008 *The End of Lawyers? Rethingking the Nature of Legal Services*, Oxford University Press Inc, New York.

Marzuki, Peter Mahmud and Muchammad Zaidun, 2015, *Revitalization of Legal Education, Arah Pendidikan Tinggi Hukum, Peran Pendidikan Hukum & Penegakkan Hukum di Indonesia*, Setara Press, Malang.

Kronman, Antony T., 1993, *The Lost Law Failing Ideals Of The Legal Profession*, Cambridge, Hardvast University Press.

Eicks, Jeanne, 2012, *Educating Superior Legal Professionals : Successful Modern Curricula Join Law And Technology*, Educating the Digital Lawyer Ch. 5, Marc Lauritsen & Oliver Goodenough Eds. Cambridge, USA: Harvard Law School Program on the Legal Profession. LexisNexis.